

I MANGADACINNA DAENG SITABA KARAENG PATTINGALLOANG SULTAN MAHMUD (KONDISI KERAJAAN ISLAM MAKASSAR MENJELANG PEMERINTAHANNYA)

Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, Syamzan Syukur
Mahasiswa Magister Sejarah Peradaban Islam UIN Alauddin Makassar, Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahmadhabibakramullah08@gmail.com
hasaruddin@uin-alauddin.ac.id
zansyukur@yahoo.com

Abstract

During that time, Makassar had already evolved into an Islamic-influenced kingdom due to the efforts of Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka Sultan Abdullah, alongside the 14th ruler of Gowa, I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin. This led the rulers to spread the Islamic faith due to an agreement made by the kings (Ulu Ada'), which was a "collective pledge" that stated: "Whoever (among the kings) finds a better path must also inform other kings who participated in the agreement." Through this path, Islam became the official religion in South Sulawesi in the year 1612. As a result, Islam was incorporated into the governance structure of each kingdom, and an institution to oversee Islamic law (officials known as Parewa Sarak) was established. This decision allowed the Kingdom of Makassar to open its doors to people of all nations to engage in trade within its territory without discriminating between different nations. The military influence of Makassar was also expanded during the reign of Karaeng Matoaya. Makassar's naval expeditions were recorded to have been sent to the northern and central regions of Sulawesi, Buton, and the Nusa Tenggara islands. In the southern regions of Sulawesi, the strong Makassar ground forces also quelled rebellions and non-compliance with their military might.

Keywords: Makassar Kingdom, Islam, King

Abstrak

Ketika kondisi pada saat itu Makassar sudah menjadi Kerajaan yang bernuansa Islam berkat usaha yang dilakukan Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka Sultan Abdullah bersama raja Gowa XIV I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin. Hal ini yang membuat raja menyebarkan agama Islam karena adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para raja-raja (Ulu Ada'), yang merupakan "ikrar bersama" yang berbunyi: "Barang siapa (di antara raja-raja itu) menemukan suatu jalan yang lebih baik, maka yang menemukan jalan itu berkewajiban untuk memberitahukan pula kepada raja-raja lainnya yang turut ikrar pada perjanjian tersebut. Dengan jalur tersebut yang ditempuh sehingga Islam dapat berkembang menjadi agama resmi di Sulawesi Selatan pada tahun 1612. Maka Islam dimasukkan dalam struktur pemerintah di setiap Kerajaan, hal ini dibuatlah sebuah lembaga mengurus syariat Islam (pejabat Sarak yang disebut Parewa sarak. Hal ini membuat Kerajaan Makassar membuka pintu untuk semua bangsa datang melakukan perdagang di wilayah Kerajaan tanpa ada membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Pengaruh militer Makassar juga diperluas pada masa pemerintahan Karaeng Matoaya. Ekspedisi laut Makassar tercatat pernah dikirimkannya

ke wilayah utara dan tengah Sulawesi, Buton, serta Nusa Tenggara. Di wilayah selatan Sulawesi, pasukan darat Makassar yang kuat juga memadamkan pemberontakan dan ketidakpatuhan dengan kekuatan militernya.

Kata Kunci: Kerajaan Makassar, Islam, Raja

Pendahuluan

Banyak orang mengira bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8. Hal ini karena pada saat itu terdapat perkampungan Islam di dekat Selat Malaka, dan para pedagang muslim yang bermukim di Selat Malaka telah menyebarkan Islam secara tidak langsung.

Namun demikian halnya, Islam masuk di nusantara tidak berlangsung dengan cara yang sama¹. Akibatnya, Islam tidak masuk di setiap wilayah nusantara dalam waktu yang bersamaan. Hal ini karena berkaitan dengan kondisi geografis nusantara tersebar di wilayah yang sangat luas dan memiliki ribuan pulau kecil dan besar.² Ini dapat memberikan sejumlah potensi ekonomi: pertanian, peternakan, kehutanan dan pertambangan. Sementara itu, sumber daya laut memberikan potensi bagi perikanan, budidaya dan perkapalan atau perdagangan maritim.³

Proses kedatangan dan penyebaran yang dilakukan dengan melalui beberapa saluran yang berbeda-beda, ada yang melalui proses pernikahan antara suatu Kerajaan dengan Kerajaan lain, proses perdagangan yang melibatkan orang muslim dengan orang pribumi pada saat itu, bahkan ada proses dari birokrasi pemerintahan, hingga pada proses jalur pendidikan dan tasawuf.⁴

Ketika Islam hadir, tidak hanya situasi politik dan sosial budaya di setiap daerah yang berbeda, tetapi juga budayanya.⁵ Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa penyebaran Islam di pulau Sumatera berbeda dengan penyebaran Islam di pulau Jawa, demikian pula halnya dengan Islam, seperti yang dilakukan oleh para ulama (mubalig)

¹H.J. De Graaf Dan Th. G. Th Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa, Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram* (Cet. III; Jakarta: Grafiti Press, 1989), h. 18

²Ahmad Yani, *Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI-XVII M (Suatu Kajian Historis)*, "Skripsi" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 3-4.

³Hasaruddin Hasaruddin, Et Al., "Tracking The Historical Development Of Kedatuan Sawitto In South Sulawesi In The Xvi-Xvii Century," *Jurnal Adabiyah* Vol. 21, No. 1 (2021), h. 42.

⁴Uka Tjandrasmita, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota-Kota Muslim Di Indonesia Dari Abad XVII Sampai XVIII Maseh* (Cet. I: Kudus: Menara Kudus, 2009), h. 28

⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasha Islamiyah II* (Ed. I: Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 194.

yang menyebarkan agama Islam di pulau Sulawesi saat itu.⁶ Akibatnya, muncul metode dan strategi para ulama (mubalig) dalam menyebarkan ajaran Islam yang sangat beragam di seluruh nusantara.

Kedatangan Islam di Pulau Sulawesi Selatan ini sangat terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di nusantara. Seperti halnya Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Maluku. Hal ini dikarenakan Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) ini sangat berpengaruh dalam bidang perdagangan pada abad akhir XVI sampai XVII.⁷

Kerajaan Gowa-Tallo merupakan Kerajaan kembar yang saling berbatasan, yang disebut oleh para sejarawan yaitu kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Barat Daya pulau Sulawesi, yang merupakan lokasi yang sangat strategis di lalui oleh para pedagang. Hal ini membuat Kerajaan Makassar tampil sebagai pusat perdagangan laut. Kerajaan ini sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Kerajaan Ternate yang terlebih dahulu menerima Islam dari Giri/Gresik.⁸ Dibawah pemerintahan Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate yang di juluk "Raja Tujuh Puluh Dua Pulau" karena pengaruhnya membentang hampir seluruh pulau Maluku dan pulau-pulau sekitarnya.⁹ Bahkan Kerajaan Ternate mengadakan persekutuan dengan Kerajaan Makassar. Dalam pertemuan tersebut raja Sultan Babullah menawarkan bantuan dan sebagai imbalannya Kerajaan Makassar untuk menerima dan masuk Islam.¹⁰ Namun hal tersebut raja Gowa-Tallo pada Kerajaan Makassar menolaknya.

Pada pengujung abad ke XVI datanglah utusan dari Kerajaan Aceh yakni raja Sultan Iskandar Muda untuk mengutus para ulama (mubalig) yang berasal dari Sumatera Barat yang berperan penting dalam Islamisasi Sulawesi Selatan yang tidak bisa di pungkiri lagi menjadikan alasan lahirnya hubungan antar Aceh dan Sulawesi Selatan. Maka Kerajaan Aceh mengutus mubalig yakni Datuk Patimang (Sulaiman), Datuk ri Tiro (Abdul Jawad), Datuk ri Bandang (Abdul Makmur) khusus untuk menyebarkan Islam di

⁶ Mubalig Orang yang Menyiarkan (Menyampaikan) Ajaran Agama Islam. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V.

⁷ Ahmad M. Sewang *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII)* (Ed. II: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 1.

⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasha Islamiyah II.*, h 80.

⁹ Chirtian Perlas, *The Bugis*, Terj. Abu Rahman, Abu, dkk, *Manusia Bugis* (Cet. I: Jakarta: Nalar, 2006), h.157.

¹⁰ J. Noorduyn, *De Islamisering Van Makassar*, Terj. S. Gunawan, *Islamisasi Makassar* (Jakarta: Bhratara, 1972), h. 13.

Sulawesi Selatan.¹¹ Dilihat dari pernyataan diatas bahwa penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari adanya akulturasi budaya lokal dan budaya Islam. Hal ini dibuktikan dengan seorang raja yang menggunakan gelar seperti “Karaeng dan Somba” sebagai pemimpin yang sering digunakan seorang raja pada kala itu. Setelah menerima Islam ia melihat kiblat Islam pada saat itu berada di Timur Tengah. Namun para pemimpin di Timur Tengah pada saat itu menggunakan gelar “sultan” sebagai pemimpin, hal inilah yang kemudian dilihat dari Kerajaan Makassar saat itu. Untuk menggunakan gelar “sultan” sebagai pemimpin.

Sementara yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Makassar yakni Datuk ri Bandang yang ahli bidang ilmu yang dimiliki yakni Ilmu Fikih. Sebab rakyat dari Kerajaan Makassar marak melakukan Perjudian, mabuk-mabukan hingga melakukan sabung ayam. Berkat dakwah beliau yang sangat menjunjung tinggi budaya adat setempat.

Datuk Ri Bandang yang berdakwah di Makassar juga berhasil mengajak Raja Tallo taat pada Islam. pada tahun 1605 Masehi, Raja Tallo I Malingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka mengucapkan dua kalimat syahadat.¹² Dan sebelumnya itu raja-raja pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinanisme. Suku-suku bangsa berdatangan dan bertempat tinggal di Somba opu yang menganut agama yang berbeda. Orang-orang dari Pulau Jawa, Sumatera dan Maluku terlebih dahulu menganut agama Islam.

I Malingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka atau Sultan Abdullah adalah seorang raja Kerajaan Tallo memerintah 1593-1623 Masehi. Sekaligus Perdana Menteri Kesultanan Makassar, yang sangat berpengaruh pada abad ke-17. Ia melantik Sultan Alauddin sebagai raja Kerajaan Gowa, menggantikan saudaranya Tunipasulu. Hubungan yang erat antara Karaeng Matoaya dan Sultan Alauddin yang berhasil meningkatkan kejayaan Kesultanan Makassar sehingga menjadi kekuatan militer dan perdagangan yang disegani di wilayah Timur nusantara.

Karaeng Matoaya adalah raja Tallo pertama yang memeluk agama Islam, yang dilakukannya bersama keluarga pada 22 September 1605. Tak lama kemudian

¹¹ Mutmainnah, dkk., *Kerajaan Gowa Pada Masa Pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia 153-1639*, Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan Dan Pendidikan Sejarah Vol. 19 No.1. 2021., h. 6.

¹² Syamsuez Salihima, *Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi*, Jurnal Rihlah Vol II No. 1 Mei 2015, H 33.

keponakannya turut serta memeluk agama Islam yakni raja Kerajaan Gowa Sultan Alauddin sehingga Islam kemudian menjadi agama resmi Kerajaan Makassar. Di bawah pimpinan I Malingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka Sultan Abdullah yang dilazim juga digelar Karaeng Matoaya dan Sultan Alauddin, Makassar yang telah memeluk Islam kemudian terlibat dalam penyebaran. Antara 1608 hingga 1611, semua Kerajaan di Sulawesi Selatan yang berada bagian sebelah Selatan dataran tinggi Toraja di mengajak untuk menerima dan menganut Islam secara damai.

Hal ini seperti yang di contohkan oleh Rasulullah saw, ketika beliau mengajak raja-raja di sekitar jazirah Arab untuk menerima Islam. Nabi mengirim utusan kepada raja-raja tetangga dengan membawa surat yang berisi argumen yang melatar belakangi ajakan itu. Demikian halnya yang di lakukan Kerajaan Makassar dalam menyebarkan agama Islam ke Kerajaan-Kerajaan tetangga khususnya Kerajaan Bugis. Kemudian didasarkan juga pada perjanjian antara Kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian itu berbunyi, “bahwa barang siapa menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan (tentang jalan yang baik itu) kepada raja-raja sekutunya” atau raja tetangga di Sulawesi Selatan.¹³

Tetapi Kerajaan Bugis menolak ajakan Kerajaan Gowa dengan asumsi bahwa ajakan itu sebagai taktik untuk memenuhi ambisi Gowa dalam memulai ekspansi dan dominasi di bidang politik dan ekonomi di seluruh Kerajaan Sulawesi Selatan. Jadi, Kerajaan Bugis tidak percaya bahwa penyampaian Islam oleh Gowa bukanlah di dasarkan pada ketulusan, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, melainkan bersifat politik. Sehingga penolakan itu menjadi alasan bagi Gowa untuk mengangkat senjata memerangi Kerajaan-Kerajaan Bugis.

Penyerangan laskar Kerajaan Makassar terhadap Kerajaan Bugis, akhirnya mengalami kekalahan dan harus memeluk agama Islam, Soppeng menerima Islam pada tahun 1609 M, Wajo menerima Islam pada tahun 1610 M, kemudian Bone pada tahun 1611 M. dengan menyerahnya Bone pada 1611 M, maka seluruh Sulawesi Selatan, kecuali Toraja, secara resmi memeluk agama Islam.¹⁴

¹³ Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa.*, h. 111-112.

¹⁴ Chirstian Perlas, *The Bugis*, H. 161.

Kerajaan Makassar mulai mengembangkan sayap kekuasaannya pada abad XVI sebelum Islam masuk sampai setelah Islam dan menjadi agama resmi Kerajaan di bawah pemerintahan raja Gowa-Tallo ke IX Daeng Matanre Tumaparisi Kallonna sampai raja Gowa ke XV Sultan Al Malikussaid bersama Sultan Mahmud I Mangadacina Karaeng Pattingalloang pada abad XVII pasca Islam sudah masuk menjadi agama resmi Kerajaan, menjadikan Somba Opu sebagai ibu kota negeri Kerajaan.

Setelah Sultan Alauddin dan Sultan Abdullah sudah menjabat selama 46 tahun sudah menyebarkan Islam ke daerah Sulawesi Selatan dan menjadikan Islam menjadi agama resmi Kerajaan. Kemudian digantikanlah oleh anaknya menjadi raja ke XV yakni, Sultan Malikud Said berserta mangkubuminya yakni Sultan Mahmud I Mangadacina Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang yang merupakan seorang raja di Kerajaan Tallo.

Kepandaian raja Sultan Muhammad Said bersama mangkubuminya Sultan Mahmud dalam berdiplomasi benar membawa perkembangan bagi peradaban Makassar. Hal ini seorang penyair Belanda yang kagum padanya yang menuliskan "wiene aldoor amuffelende brein Een gansche wereld valt ke klein" yang bisa diartikan "Orang yang berfikir selalu sibuk mencari sehingga seluruh dunia terlalu kecil baginya".¹⁵

Berkat kemampuan intelektual I Mangadacina Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang yang menjabat sebagai raja Tallo dan sekaligus sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa pada periode I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Malikussaid raja Gowa XV (1639-1653), maka susunan ketatanegaraan semakin sempurna dan Makassar semakin berkembang menjadi kota dan bandar niaga dengan segala alat perlengkapannya. Makassar dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan utama yaitu Somba Opu, keraton raja yang megah di sebelah selatan dilindungi oleh benteng Panakukkang dan di sebelah Utara oleh benteng Ujung Pandang.

Bukti-bukti sejarah ini menunjukkan bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari di Kerajaan Makassar pada masa itu memberikan indikasi terbentuknya masyarakat yang plural dan adanya toleransi antar umat beragama, sehingga kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakini dapat terselenggara dengan baik.¹⁶

¹⁵ H.L. Purnama, *Kerajaan Gowa; Masa Demi Penuh Gejolak*, (Makassar: Arus Timur 2014), h. 28.

¹⁶ Susmihara, *Kemajuan Budaya Masyarakat Makassar Abad XVII*, (*Jurnal Adabiyah* Vol. 16 No. 1, 2016), h.63-64.

Dengan didirikan sebuah gereja untuk pada saat itu sehingga orang-orang Eropa dapat melakukan ibadah, selain itu raja dan mangkubuminya memiliki konsep wawasan ke masa depan dengan hadirnya orang-orang Eropa mampu memperpadukan ilmu pengetahuan membuat Kerajaan Makassar saat itu maju pesat.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti ingin mengupas lebih jauh mengenai bagaimana kondisi Makassar menjelang pemerintahan I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud. Berdasarkan penelusuran penelitian, ada beberapa literatur yang berkaitan atau penelitian terlebih dahulu yang serupa.

Abd Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa yang memaparkan awal mula berdirinya Kerajaan Gowa, perkembangan Kerajaan Gowa setelah Tallo menjadi sebuah Kerajaan di dalam lingkungan Kerajaan Gowa- Raya, masa Pemerintahan Raja Gowa yang ke XV “Sultan Malikussaid” dan Raja Gowa XVI “Sultan Hasanuddin”.

Edward L.Poulingomang dkk, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, 2004. ini menyangkut sejarah Kerajaan-Kerajaan besar yakni Kerajaan Gowa-Tallo dan Kerajaan Bone, dan menjadikan Kerajaan Gowa-Tallo saat itu menjadi pusat perdagangan pada saat itu, selain itu pula Kerajaan Gowa di kenal Kerajaan Tangguh dengan sekutuhnya Wajo dan Luwu, Kerajaan Gowa juga mengajak Bone, Soppeng dan Wajo memeluk Islam, bahkan dengan perang (Musu Selleng) tetap mempertahankan kekuasaannya. Bagi Wajo lebih baik bekerja sama dengan Kerajaan Gowa dibandingkan dengan Kerajaan Bone.

Lontarak’ Bilang Gowa-Tallo diterbitkan oleh Kantor II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang memaparkan tentang peristiwa-peristiwa silsilah dan kegiatan raja-raja Gowa Tallo pada saat itu dan dilengkapi dengan tanggal kejadian, baik peninggalan Masehi maupun Hijriah.

Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai abad XVII, 2005. membahas proses Islamisasi Kerajaan Gowa dan pengaruh Kerajaan Gowa terhadap proses Islamisasi di Kerajaan-Kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan pada abad XVI sampai.

Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar Terhadap Umat Islam Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII, “Tesis”, 2018, membahas tentang peperang Makassar yang melibatkan kesultanan Kerajaan Makaassar dengan koloniel Belanda, salah satu faktornya yang dipengaruhi oleh letak geografis dalam jalur perdagangan dan ingin memonopoli perdagangan.

Dari beberapa buku karya ilmiah diatas secara umum sangat relevan dengan penulisan tesis tersebut, namun perlu kita ketahui secara khusus ada beberapa buku hanya membahas proses masuknya Islam di Kerajaan Makassar (Gowa-Tallo) dan Islamisasi Kerajaan Makassar dan Kerajaan yang ada disekitarnya dengan melalui seorang raja Tallo dan yang menjadi Mangkubumi di Kerajaan Makassar yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam, sedangkan penulisan tesis ini menjelaskan salah satu tokoh sejarah yakni Sultan Mahmud I Mangadacina Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang dalam membangun peradaban Islam Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*Library research*) yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, datanya didapat dari buku-buku perpustakaan, arsip, jurnal, dan sejenisnya. Adapun langkah-langkah yang diperoleh seperti; Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kondisi Makassar menjelang Pemeritahan Karaeng Pattingalloang.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Sosial Keagamaan

Sebelum masuknya agama samawi yaitu Islam dan Kristen ke Sulawesi Selatan, penduduknya telah mengenal dan menganut kepercayaan asli.¹⁷ Sistem kepercayaan yang di maksud adalah bayang atau gambaran manusia terhadap berbagai perwujudan yang berada di luar jangkau akal dan pikiran manusia.¹⁸ Pokok kepercayaan merupakan apa saja dari adat dan kebiasaan hidup yang mereka peroleh dari nenek moyangnya. Kepercayaan aslinya tersebut umumnya bersifat ananisme dan dinamisme.¹⁹

¹⁷ Suriadi Mappangara, Irwan Abbas. Sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Biro KAPP Setda Sulsel bekerja sama Lamaca Press. 2003., h. 29.

¹⁸ Mustaqim Pabbajah, Religusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar, jurnal Al-Ulum Vol 12, no 2, Desember 2012, h 398.

¹⁹ Ahmad M. Sewang Isamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII) (Ed. II: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 45-46.

Kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap arwah leluhur yang mendiami setiap benda (pohon, batu, sungai dan sebagainya), animisme sendiri mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat pada saat itu. Selain kepercayaan animisme, masyarakat Makassar pra Islam menganut kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.²⁰

Beberapa raja-raja sebelumnya pada Kerajaan Makassar yang terkenal masih menganut kepercayaan tersebut seperti: raja ke Gowa IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna, raja ke Gowa X Karaeng Tunipallangga hingga raja ke XIII Karaeng Tunippasulu. Ketika pengaruh Islam dan Barat telah menyentuh masyarakat Sulawesi Selatan pada abad XV. Pada saat itu Sulawesi Selatan sedang berlangsung kegiatan Kerajaan-kerajaan berdasarkan konsepsi kekuasaan To Manurung, namun ada kaidah-kaidah atau norma-norma kehidupan Adat Istiadat pra-Islam yang mengatur Kerajaan-kerajaan lokal dalam perkembangan kehidupan pada saat itu ialah, *Panggadakkang* atau *Panngadareng*.

Adapun prinsip-prinsip umum yang harus dilaksanakan dalam *Panggadakkang* atau *Panngadareng* dalam berbagai bidang lapangan yaitu; Ade, yang mengurus tentang tatacara penyusunan dan penyelenggaraan kekuasaan; Bicara, yang mengurus tatacara penyelenggaraan kekuasaan peradilan dan menetapkan peraturan-peraturan yang menyangkut wewenang kekuasaan; Rapang, yang mengurus tradisi kehidupan yang sudah ada dalam masyarakat umum; Wari, yang mengurus hubungan-hubungan kekerabatan, lapisan sosial dan penempatan struktur penempatan para pejabat kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian empat unsur yang terdapat dalam *Panggadakkang* atau *panngadareng* yang menjadi dasar dalam melaksanakan ketertiban pemerintahan dan peradilan dalam Kerajaan-kerajaan lokal yang berada di Sulawesi Selatan.²¹

Penerimaan Islam di Masyarakat Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peranan para 3 datuk yang mampu mengubah keyakinan tersebut, hal ini dengan keahlian dalam bidang fikih, tauhid, tasawuf. Disini penyebaran Islam didasarkan pada perhitungan yang

²⁰ Eka Iestari, *Islamisasi di Kerajaan Luwu abad XVII.*, h. 22.

²¹ A. Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Cet.1 Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998, h. 84-85*

cermat oleh para 3 datuk. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan memiliki pola yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Hanya saja, sasaran objek penyebaran Islam di daerah Sulawesi Selatan bersifat top-down dari penguasa kemudian rakyatnya.²²

Tepatnya masuknya Islam di kerajaan Makassar adalah hari Kamis tanggal 22 September 1605 bertepatan tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah.²³ Berselang 2 tahun kemudian agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Makassar tepatnya 9 November 1607, sebagai buktinya diadakan Sholat Jum'at yang pertama kalinya di Tallo' yakni pada tanggal 9 Nopember 1607 M (18 Rajab 1016 H). Seperti yang di kemukakan oleh Ligtvoet.

Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka inilah yang memegang peranan penting sangat penting dalam usaha mengembalikan keharuman dan kejayaan yang hampir punah di bawah kekuasaan raja ke-13. Dalam lontarak harian Gowa dan Tallo banyak dituliskan bahwa banyak peristiwa penting dalam masa pemerintahan Sultan Abdullah.

Misalnya pembangunan masjid yang pelopori oleh Mangkubumi/Raja Tallo Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka. Peranan penting Karaeng Matoaya, selain sebagai Mangkubumi juga bertindak sebagai kepala negara.²⁴ Ketika kondisi pada saat itu Makassar sudah menjadi Kerajaan yang bernuansa Islam berkat usaha yang dilakukan Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka Sultan Abdullah bersama raja Gowa XIV I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin. Hal ini yang membuat raja menyebarkan agama Islam karena adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para raja-raja (Ulu Ada'), yang merupakan "ikrar bersama" yang berbunyi: "Barang siapa (di antara raja-raja itu) menemukan suatu jalan yang lebih baik, maka yang menemukan jalan itu berkewajiban untuk memberitahukan pula kepada raja-raja lainnya yang turut ikrar pada perjanjian tersebut."²⁵

²² Hasse Jubba, Ahmad Sultra, Juhansar, Kompromi Islam dan Adat Praktik Keagamaan Muslim Bugsi di Sulawesi Selatan, JSW: jurnal sosiologi Walisongo- vol 2, no 2. 2018, h. 144.

²³ Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Makassar:1993., h. 19.

²⁴ Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar sebagai kota Martim, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2000, h. 37-38.

²⁵ Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, Badan Penelitian dan pengembangan Daerah (Balitbangda). Cet.1. September. 2004, h. 89.

Kemudian Kerajaan Makassar mengirimkan surat kepada Kerajaan yang ada disekitarnya, tekhusus Kerajaan Bugis yang masih menganut agama lain. Setelah menempuh proses panjang yang dilakukan Kerajaan Makassar dalam menyebarkan agama Islam. Adapun jalur yang dilakukan, pertama, jalur secara damai, seperti Sawitto, Balanipa di Mandar, Bantaeng dan Selayar, kedua, jalur secara peperangan, proses Islamisasi yang dilakukan di kerajaan Bugis tidak dapat berjalan secara damai, karena kerajaan-kerajaan Bugis menolak ajaran Islam, karena di pandangan sebagai usaha hegemoni (menguasai) kerajaan Makassar terhadap Kerajaan Bugis yang menolak Islam (Musu Selleng). Kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam persekutuan Tellumpocce, yaitu Soppeng, Wajo dan Bone inilah yang menolak ajakan Kerajaan Makassar untuk menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan.²⁶

Dengan jalur tersebut yang ditempuh sehingga Islam dapat berkembang menjadi agama resmi di Sulawesi Selatan pada tahun 1612. Maka Islam dimasukkan dalam struktur pemerintah di setiap Kerajaan, hal ini dibuatlah sebuah lembaga mengurus syariat Islam (pejabat Sarak yang disebut Parewa sarak, yang tugas raja yang dahulunya mengembangkan agama Islam beralih ke tangan pejabat Sarak atau Parewa sarak. Pejabat sarak ini lalu mengembangkan agama Islam melalui pengajian dan pendidikan dikalangan masyarakat, demikian itu juga pada kalangan bangsawan dan istana. Pengajian-pengajian yang dilakukan mulai tingkat dasar karena pada awal penerimaan agama Islam. Masyarakat hanya diajarkan dasar-dasarnya saja yaitu berupa pengucapan dua kalimat syahadat dan rukun Iman dan rukun Islam.²⁷

Penerimaan Islam sebagai agama Kerajaan merupakan titik awal Islamisasi dalam kehidupan sosial keagamaan. Islamisasi tidak dapat mengubah segala pranata kehidupan sosial dan politik yang telah ada, tetapi pada umumnya pranata-pranata yang ada tetap di pertahankan, akan tetapi diisi dan dilengkapi dengan pranata baru yang berdasarkan Islam.

Lembaga Sarak diadakan setelah menjadi agama resmi pada tahun 1607. Pemimpin tertinggi dalam lembaga agama, sarak adalah Daeng Ta Kaliya. Daeng Ta Kaliya bertugas untuk mengurus masalah keagamaan dalam masyarakat, seperti masalah

²⁶ Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1., h. 92

²⁷ Suriadi Mappangara, Irwan Abbas. Sejarah Islam Di Sulawesi Selatan., h.111.

nikah, talak, rujuk, warisan serta pemeliharaan rumah ibadah. Ia juga bertugas untuk menjadi penanggung jawab dalam pengambilan sumpah dengan al Qur'an yang dilakukan oleh Sombaya. Kemudian dalam menjalankan tugas sehari-hari, Daeng Ta Kaliya di bantu oleh beberapa pejabat dibawahnya, yaitu Daeng Imang, Guruwa, Katte, Bidala, dan Doya yang merupakan aparat agama (Pawera Sarak).²⁸

Pada zaman Dato Sulaiman dan Dato Ri Bandang penyebaran agama Islam di Tanah Wajo boleh dikatakan sangat sukses karena berhasil menciptakan perpaduan yang kokoh antara ade dan sarak sesuai dengan pangadareng.²⁹

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Munculnya dan berkembangnya bandar niaga di Sulawesi Selatan dipengaruhi dengan perubahan politik dan ekonomi yang terjadi diakibatkan campur tangan (intervensi) orang Eropa dan dinamika penguasa Kerajaan Makassar pada saat itu.³⁰

Abad XV-XVI, dapat dikatakan secara umum sebagai zaman terbentuknya pola-pola fundamental mengenai konsepsi kekuasaan pemerintahan Kerajaan Bugis dan Makassar. Dengan pola-pola itu mereka memperluas wilayah kekuasaan, melalui persaingan-persaingan yang panas dan yang mengandung permusuhan dan peperangan yang berkepanjangan.³¹

Jadi jauh sebelum pemerintahan Karaeng Pattingalloang menjadi mangkubumi di Kerajaan Makassar, sudah ada kemajuan yang telah dicapai oleh raja-raja pendahulunya, terutama pada masa pemerintahan Karaeng Tumaparisik Kallonna (1510-1546) raja Gowa IX pada saat itu. Dugaan itu didasarkan atas beberapa faktor. Pertama, Sebelum masa pemerintahannya istana raja dan pusat pemerintahan di Tamalate. Hal ini membuat dipandang dengan berorientasi ke dunia agraris. Kedua, raja ini mengawali pemindahan istana dan pusat pemerintahan ke Benteng Somba Opu yang dibangun di pesisir dekat muara sungai Jeneberang. Kemudian wilayah Somba Opu ini yang dijadikan sebagai bandar perdagangan. Ketiga, pada pemerintahannya baru dikenal adanya jabatan

²⁸ Ahmad M. Sewang. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII)*, h.134-135.

²⁹ Suriadi Mappangara, Irwan Abbas. *Sejarah Islam Di Sulawesi Selatan*. h.114-115.

³⁰ Suriadi Mappangara, Irwan Abbas. *Sejarah Islam Di Sulawesi Selatan*. h.114-115.

³¹ Edward L. Poelinggomang, dkk. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*, h. 51.

syahbandar yang bertugas mengatur lalu lintas dan pajak perdagangan di pelabuhan Somba Opu.³²

Prof. Mukhlis Paeni telah mengungkapkan bahwa usaha dalam memperluas pengaruh kekuasaan terhadap Kerajaan-kerajaan di bagian Selatan dari Kerajaan Makassar. Hal itu berkaitan erat dengan usahanya untuk mengawasi jalur perdagangan dan perlindungan terhadap kedudukan bandar niaga di Somba Opu dan memperluas wilayah kekuasaannya.³³

Ketika Karaeng Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) menduduki tahta menjadi raja, melaksanakan lagi penaklukan terhadap kerajaan yang berada disekitarnya seperti, Siang, Suppa, Sidenreng, Soppeng, Lammatti, Wajo, Bulukumba dan berbagai kerajaan kecil disekitar Kerajaan Bone.

Pada dasarnya Kerajaan Makassar sangat giat melakukan perluasan dengan cara memerangi dan menaklukan daerah-daerah yang berada disekitar Sulawesi Selatan seperti, Grassi, Katingang, Siang, Suppa, Sawitto dan daerah lainnya. Semetara Kerajaan yang dipungti upeti adalah Bulukumba dan Selayar. Selain itu Kerajaan yang bekas sekutu dari Kerajaan Tallo seperti (Maros dan Polongbangke) dan beberapa Kerajaan yang kuat seperti, Sulameko, Bone dan Luwu telah menjalin perjanjian persahabatan. Politik kekuasaan yang dilakukan Kerajaan Makassar sehingga dapat memajukan bandar niaga.³⁴

Kebijakan politik dari Karaeng Tunipangga Ulaweng, pertama-tama bertujuan untuk memudahkan dan menenyapkan bandar niaga kerajaan-kerajaan lain yang berada disekitarnya. Tindakan ini secara tidak langsung memaksa para pedagang untuk mengalihkan kegiatan perdagangan mereka ke wilayah kerajaan Makassar yakni Somba Opu. Dapat diketahui bersama pada masa periode pemerintahannya datang Anakhoda Bonang berasal dari Jawa sebagai wakil para pedagang Melayu yang bermohon kepada raja untuk menetap dan melakukan perdagangan di Somba Opu. Para pedagang Melayu ini sebelumnya menjadikan Kerajaan Siang sebagai koloni dagang mereka. Kemudian permohonan mereka terpenuhi dan diberikan izin untuk menetap di Mangngallekana. Daerah tersebut sudah berada di bawah pengawasan syahbandar I Mangngambari

³² Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, h. 53.

³³ Zaiuddin Tika M, Ridwan Syam, Karaeng Pattingalloang, Makassar, h. 11.

³⁴ Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, h. 55

Karaeng Mangngaweang, sehingga dikenal sebagai I Daeng ri Mangngallekana.³⁵ Tujuan lainnya yang terkandung dalam politik perluasan kekuasaan itu adalah dengan mempertimbangan kedudukan wilayah yang ditaklukkan dan menjalin hubungan kekuasaan untuk menguasai sumber ekonomi yakin perdagangan.³⁶

Bahkan setelah masa kekuasaan pemerintahan Karaeng Tumapa'risi Kallonna hingga Karaeng Tunipallangga sempat mengalami kemerosotan pada masa pemerintahn raja Gowa ke-13 Tunipassulu banyak mengalami kekacauan. Pada abad ke XVI masa dimana banyaknya Kerajaan di Sulawesi Selatan yang mulai nampak kekuatannya dan muncul dengan status "New Emerging Force" serta kekuatan-kekuatan lama yang berusaha mempertahankan eksistensinya. Kerajaan Makassar yang baru saja muncul dengan tampilan sebagai dua Kerajaan kembar dan berorientasi maritim berusaha untuk berpartisipasi aktif dalam perpolitikan lokal Sulawesi Selatan terutama dalam hal ekspansi. Kerajaan Makassar dari masa kekuasaan Karaeng Tumapa'risi Kallonna hingga Karaeng Tunipallangga menjadi salah satu yang paling aktif menjalankan kegiatan ekspansinya. Keberhasilan Kerajaan Makassar menguasai wilayah sekitarnya dengan begitu sangat gemilang, tapi belum lengkap jika belum menguasai jalur perdagangan yang merupakan target utama dari Kerajaan Makassar.

Wilayah sebelah Utara terdapat Kerajaan Suppa yang terlebih dahulu yang menguasai jalur perdagangan laut pasca jatuhnya Malaka pada tahun 1511. Untuk menguasai jalur perdagangan tersebut Kerajaan Makassar harus menaklukkan Kerajaan Suppa. Namun, sebelum melakukan penyerangan tentunya Kerajaan Suppa sudah bergabung menjadi konfederasi Limae Ajatappareng.

Adapun konsep yang dilakukan Kerajaan Makassar ialah dengan cara melakukan perkawinan antara Kerajaan Bugis dan Kerajaan Makassar merupakan sesuatu yang sangat penting. Pentingnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari seleksi calon mempelai yang cukup rumit, karena mempunyai kepentingan masing-masing pada perkawinan antara Kerajaan. Tujuan dari perkawinan antara Kerajaan selain untuk mengawinkan putra-putri Kerajaan juga biasanya untuk mengawinkan Kerajaan demi mengamankan

³⁵ Terkait dengan para pedagang Melayu melakukan permohonan tempat menetap dan berniaga di Siang, Namun daerah permukiman tersebut di bawah pengawasan Syahbandar I Daeng ri Mangngallekana, baca; Abd.Razak Daeeng Patunru Sejarah Gowa., h. 14; Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, h. 56.

³⁶ Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, h. 57

persekutuan dari kolonial maupun mempertahankan hubungan-hubungan yang telah terjalin sebelumnya.³⁷

Kemudian raja dari Kerajaan Makassar yakni Karaeng Tunipallangga mencoba mendekati Kerajaan Suppa untuk dengan jalur pernikahan dengan menikahkan putranya dengan putri dari Kerajaan Suppa, kemudian Datu Suppa La Makkarawie menerima tawaran tersebut. Akan tetapi kemudian hari Datu Suppa La Makkarawie menerima lamaran dari Kerajaan Sawitto. Mendengar hal tersebut sehingga membuat Kerajaan Makassar marah sebab harga dirinya telah di permalukan. Maka terjadilah peperangan antara Kerajaan Makassar dengan menghadapi Kerajaan Suppa dan Sawitto sekaligus yang berlangsung tujuh tahun. Namun pada tahun ketujuh akhirnya Kerajaan Suppa dan Sawitto dapat ditaklukkan.

Pasca penaklukan Suppa dan Sawitto oleh Kerajaan Makassar, maka semua kegiatan perekonomian dialihkan ke bandar perdagangan Kerajaan Makassar. Peralihan tersebut dibuktikan dengan banyaknya pemukiman pedagang asing di sekitar Kerajaan Makassar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Suppa dan Sawitto tidak hanya kalah dalam peperangan tetapi juga menderita kekalahan dalam hal perekonomian. Kekalahan ini juga mengakhiri persaingan antara Kerajaan ini untuk menguasai jalur perdagangan bagian Timur.³⁸

Ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Makassar melalui penaklukan dalam menguasai ekonomi memberikan dampak positif yakni di satu sisi Kerajaan Makassar sebagai pemenang dalam peperangan berhak untuk menguasai Kerajaan taklukannya dan pihak yang kalah harus menanggung semua kerugian yang ditimbulkan setelah berakhirnya peperangan dan akibat penaklukan dari Limae Ajatappareng membuat nasib Kerajaan Siang kehilangan fungsinya utama sebagai pelabuhan penting pada saat itu. Adapun dampak negatif kebanyakan membawa penderitaan bagi Limae Ajatappareng.

Kemudian dilanjutkan oleh pada masa pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin bersama mangkubuminya Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka Sultan Abdullah yang memegang peran penting

³⁷ Sahrul Habrianto. S, dkk, Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo Ke Limae Ajatappareng Abad XVI. Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan. Vol. 6, No.3, Desember 2019, h.24 h. 24.

³⁸ Sahrul Habrianto. S, dkk, Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo Ke Limae Ajatappareng Abad XVI, h. 25.

menjadi kepala pemerintahan.³⁹ Hal ini membuat Kerajaan Makassar membuka pintu untuk semua bangsa datang melakukan perdagang di wilayah Kerajaan tanpa ada membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Selain itu menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan dan juga sebagai pelabuhan transit terpenting dari komoditi rempah-rempah dan kayu cendana. Sebagai bandar perdagangan Internasional yang pemerintahannya sangat toleransi kepada siapa saja. Hal itulah yang menjadikan Belanda juga ingin memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Makassar, sehingga memanfaatkan sifat terbuka yang diterapkan raja Kerajaan Makassar (Gowa-Tallo) tersebut untuk melakukan kontak perdagang dengan kerajaan Makassar.⁴⁰

Keterbukaan Kerajaan Makassar terhadap semua pedagang memperlancar hubungan dagang dengan pusat perdagangan lainnya. I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka Sultan Abdullah, diberitakan mendapatkan izin dari penguasa Banda untuk menempatkan wakil di Banda pada tahun 1607. Selain itu atas izin pemerintahan Spanyol di Filipina, sehingga penguasa Kerajaan Makassar mendirikan perwakilan dagangnya di Manila.

Menurut Speelmen; perwakilan dari Kerajaan Makassar di Manila, dikarenakan pedagang Melayu dan Jawa dilarang mengunjungi Manila dengan mengatasnamakan Kerajaan Makassar, akhirnya pemerintah Spanyol hanya menerima pedagang dari kerajaan Makassar, karena memiliki hubungan dagang yang baik, mereka juga memenuhi permintaan rempah-rempah dan komoditas lainnya seperti beras.

Adapun taktik yang dilakukan yang di ungkapkan dalam catatan Van Der Chijs di Banda:

Ia setiap tahun menyediakan beras, pakaian dan segala sesuatu yang disenangi di Banda agar dapat mengumpulkan pala sebanyak mungkin bagi negerinya, sehingga memmikat para pedagang serta dapat memborong dalam jumlah besar; ia juga tahu bagaimana memberikan hadiah kepada para ulama Banda agar dapat mengeruk keuntungan besar.⁴¹

³⁹ Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar sebagai kota Martim, h. 37-38.

⁴⁰ Mutmainnah, dkk., Kerajaan Gowa pada Masa Pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia 153-1639., h. 7.

⁴¹ J. C. van Leur, *Indonseia trade and society Lessays in Asian social and ecomonic history*, (Bandung: Sumur Bandung), 1960, h. 134.

Kemajuan yang dicapai Kerajaan Makassar ternyata tidak menyukai pedagang Belanda. Hal ini yang membuat mereka tidak menginginkan pedagang Eropa lainnya berkeliaran di Pelabuhan Somba Opu.

Dari penjelasan diatas Kerajaan Makassar sudah melakukan ekspansi dengan menaklukan Kerajaan yang berada disekitar. Hal ini membuat Kerajaan Makassar mampu menguasai pelabuhan. Pelabuhan yang dikuasai dijadikan sebagai pelabuhan penunjang dari pelabuhan utama yang berada di Somba Opu yang dapat menunjang perekonomian Kerajaan Makassar.

3. Kondisi Sosial Politik

Berbicara politik sebelum pemerintahan Karaeng Pattingalloang tidak terlepas dari peran penting raja-raja sebelumnya dari Kerajaan Makassar, raja ke Gowa IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna yang melakukan ekspansi memperluas wilayah. Hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan berada dibawah lindunganya atau dibawah kekuasaanya.⁴²

Pada tahun 1538 barulah orang-orang Portugis sampai ke Somba Opu dan mereka pertama kali mengadakan hubungan dengan raja Gowa, dalam hal ini IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna. Orang-orang Portugis mencoba memasukan ajaran agama Nasrani. Kemudian oleh Gubenur Portugis yang berada di Ternate mengirimkan beberapa buah kapal ke Somba Opu dengan maksud untuk mempererat hubungan dengan orang-orang Portugis dan raja Gowa. Orang-orang Portugis memberikan kepada raja Gowa dari Kerajaan Makassar untuk mendirikan benteng atau memperbaikinya, sehingga benteng tersebut menyerupai benteng-benteng pertahanan atau kasteel yang ada di Eropa Barat abda XV.⁴³

Ketika raja ke Gowa IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna wafat, maka yang melanjutkan pemerintahan Kerajaan Makassar ialah putranya raja ke Gowa X Karaeng Tunipallangga bersama mangkubumi I Mappatakatana Daeng Padulung (raja Tallo) yang kemudian melanjutkan ekspansi, dengan politik perluasan pengaruh kekuasaan dengan mengepung Kerajaan Bone dari darat dan laut. Kerajaan-kerajaan yang berbatasan dengan Kerajaan Bone, termasuk Kerajaan Luwu berhasil dibawah kekuasaan politik

⁴² J. C. van Leur, *Indonseia trade and society Lessays in Asian social and ecomonic history*, (Bandung: Sumur Bandung), 1960, h. 134.

⁴³ A. Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan.*, h. 120.

Kerajaan Makassar. Peperangan antara Kerajaan Makassar dan Kerajaan Bone berlangsung bertahun-tahun lamanya.

Ketika raja dari Kerajaan Makassar I Mario Gau jatuh sakit sehingga pasukannya kembali. Empat puluh hari setibanya di Kerajaan Makassar akhirnya, raja I Mario Gau meninggal dan meninggalkan banyak jasa. Namun permusuhan antara Kerajaan Makassar dan Kerajaan Bone yang berkelanjutan.⁴⁴

Pada Masa Pemerintahan raja dari Kerajaan Makassar yakni I Tepu Karaeng Parabbung. Putra dari raja Gowa ke XII Tunijallo dari kerajaan Makassar. Dalam usia masih belia telah dinobatkan sebagai raja Gowa pada Kerajaan Makassar saat itu. Dicatat dalam Lontarak Gowa dijelaskan bahwa raja ini telah banyak melakukan perbuatan tercela dan membuat kekacauan di negeri ini.⁴⁵

Hal ini menyebabkan banyak pedagang Melayu dan Jawa yang bermukim di Mangngallekana akhirnya meninggalkan Kerajaan Makassar. bahkan orang-orang terkemuka dari Kerajaan Makasar meninggalkan kerajaannya. Namun para pembesar-besar utama yang tetap bertahan untuk menjaga keutuhan Kerajaan seperti Karaeng Matoaya, Karaeng Data, Karaeng Barombong dan beberapa pembesar lainnya.

Ketika raja Gowa ke XII Tunijallo dan raja Gowa XIII Tunipassulu yang menjabat di Kerajaan Makassar mulai mengalami kemunduran, pertama karena disebabkan banyak para pedagang telah meninggalkan kerajaan, kedua, dendam yang terus membara dan konflik berkepanjangan antara Gowa, Bone, Soppeng dan Wajo, menjelang abad XVII masih berkelanjutan, ketiga, masalah baru muncul dengan datangnya orang-orang Eropa yang telah memasuki wilayah Nusantara, mulai dengan penaklukan bangsa Portugis atas semenajung Malaka (1511). Hal ini sangat mempengaruhi ketidakstabilan di kawasan Timur yang menjadi pemegang keunggulan di perairan jalur perdagangan.⁴⁶

Ketika Kerajaan Makassar sudah diambang kehancuran yang menjadi penyelamat dari Kerajaan Makassar ialah mangkubuminya, yaitu I Mallingkaang Daeng Manyonri yang menjadi raja di Kerajaan Tallo. Karaeng Matoaya yang bertanggung jawab dan menjadi harapan rakyat dari Kerajaan Makassar. Hal ini kemudian didukung oleh Bate Salampang, untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunya. Hal ini membuat Kerajaan

⁴⁴ A. Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan.*, h. 116.

⁴⁵ A. Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan.*, h. 118.

⁴⁶ Edward L. Poelinggomang, *dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*, h. 60.

Makassar memasuki gerbang abad XVII yang begitu banyak permasalahan yang dihadapi baik dari luar maupun dari lingkungan Kerajaan sekitar.⁴⁷

Pengaruh militer Makassar juga diperluas pada masa pemerintahan Karaeng Matoaya. Ekspedisi laut Makassar tercatat pernah dikirimkannya ke wilayah utara dan tengah Sulawesi, Buton, serta Nusa Tenggara. Di wilayah selatan Sulawesi, pasukan darat Makassar yang kuat juga memadamkan pemberontakan dan ketidakpatuhan dengan kekuatan militernya. Karaeng Matoaya memerintahkan pembuatan meriam dan mesiu, membuat kapal-kapal baru dengan rancangan lebih mutakhir, mencetak mata uang emas untuk perdagangan, serta memperkuat benteng di pantai Gowa dengan batu bata untuk menahani serangan dari arah laut.⁴⁸

Dengan melihat raja-raja sebelumnya yang memerintah di Kerajaan Makassar pada abad XVI, tentunya sangat berpotensi terjadi sebuah konflik dalam kehidupan mental dan fisik di Sulawesi Selatan, tetapi dari sisi lain juga dapat membangun integritas yang sangat kuat. Konflik yang dilakukan oleh raja-raja tidak lain hanya ingin memperluas kekuasaannya.⁴⁹ Hal ini dibuktikan dengan sangat menjunjung tinggi *siri* (harga diri) dari masing-masing Kerajaan.

Penutup

Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka inilah yang memegang peranan penting sangat penting dalam usaha mengembalikan keharuman dan kejayaan yang hampir punah di bawah kekuasaan raja ke-13. Dalam lontarak harian Gowa dan Tallo banyak dituliskan bahwa banyak peristiwa penting dalam masa pemerintahan Sultan Abdullah.

Ketika kondisi pada saat itu Makassar sudah menjadi Kerajaan yang bernuansa Islam berkat usaha yang dilakukan Karaeng Matoaya I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka Sultan Abdullah bersama raja Gowa XIV I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin. Hal ini yang membuat raja menyebarkan agama Islam karena adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para raja-raja (Ulu Ada'), yang merupakan "ikrar bersama" yang berbunyi: "Barang siapa (di antara raja-raja itu)

⁴⁷ Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, h. 63.

⁴⁸ William Cummings, *Making Blood White: Historical Transformations in Early Modern Makassar* (edisi ke-berilustrasi). University of Hawaii Press. (2002). h. 30-32.

⁴⁹ A. Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan.*, h. 121.

menemukan suatu jalan yang lebih baik, maka yang menemukan jalan itu berkewajiban untuk memberitahukan pula kepada raja-raja lainnya yang turut ikrar pada perjanjian tersebut.

Dengan jalur tersebut yang ditempuh sehingga Islam dapat berkembang menjadi agama resmi di Sulawesi Selatan pada tahun 1612. Maka Islam dimasukkan dalam struktur pemerintah di setiap Kerajaan, hal ini dibuatlah sebuah lembaga mengurus syariat Islam (pejabat Sarak yang disebut Parewa sarak, yang tugas raja yang dahulunya mengembangkan agama Islam beralih ke tangan pejabat Sarak atau Parewa sarak.

Hal ini membuat Kerajaan Makassar membuka pintu untuk semua bangsa datang melakukan perdagang di wilayah Kerajaan tanpa ada membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Selain itu menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan dan juga sebagai pelabuhan transit terpenting dari komoditi rempah-rempah dan kayu cendana. Sebagai bandar perdagangan Internasional yang pemerintahannya sangat toleransi kepada siapa saja. Hal itulah yang menjadikan Belanda juga ingin memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Makassar, sehingga memanfaatkan sifat terbuka yang diterapkan raja Kerajaan Makassar (Gowa-Tallo) tersebut untuk melakukan kontak perdagang dengan kerajaan Makassar.

Keterbukaan Kerajaan Makassar terhadap semua pedagang memperlancar hubungan dagang dengan pusat perdagangan lainnya. I Malingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka Sultan Abdullah, diberitakan mendapatkan izin dari penguasa Banda untuk menempatkan wakil di Banda pada tahun 1607. Selain itu atas izin pemerintahan Spanyol di Filipina, sehingga penguasa Kerajaan Makassar mendirikan perwakilan dagangnya di Manila.

Ketika Kerajaan Makassar sudah diambang kehancuran yang menjadi penyelamat dari Kerajaan Makassar ialah mangkubuminya, yaitu I Malingkaang Daeng Manyonri yang menjadi raja di Kerajaan Tallo. Karaeng Matoaya yang bertanggung jawab dan menjadi harapan rakyat dari Kerajaan Makassar. Hal ini kemudian didukung oleh Bate Salapang, untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunya. Hal ini membuat Kerajaan Makassar memasuki gerbang abad XVII yang begitu banyak permasalahan yang dihadapi baik dari luar maupun dari lingkungan Kerajaan sekitar.

Pengaruh militer Makassar juga diperluas pada masa pemerintahan Karaeng Matoaya. Ekspedisi laut Makassar tercatat pernah dikirimkannya ke wilayah utara dan

tengah Sulawesi, Buton, serta Nusa Tenggara. Di wilayah selatan Sulawesi, pasukan darat Makassar yang kuat juga memadamkan pemberontakan dan ketidakpatuhan dengan kekuatan militernya. Karaeng Matoaya memerintahkan pembuatan meriam dan mesiu, membuat kapal-kapal baru dengan rancangan lebih mutakhir, mencetak mata uang emas untuk perdagangan, serta memperkuat benteng di pantai Gowa dengan batu bata untuk menahani serangan dari arah laut. Sistematika penulisan hasil penelitian berisikan pendahuluan yang berisi latar belakang, beberapa bagian tinjauan pustaka dan tujuan penelitian; metode penelitian; hasil penelitian; pembahasan; simpulan dan saran; daftar pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dalam artikel yang ditulis).

Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan footnote

Daftar Pustaka

- A. Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Cet.1 Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998, h. 84-85
- Cummings, William, *Making Blood White: Historical Transformations in Early Modern Makassar* (edisi ke-berilustrasi). University of Hawaii Press. (2002).
- Daeng Patunru, Abd. Razak, *Sejarah Gowa*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Makassar:1993.
- H.J. De Graaf Dan Th. G. Th Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa, Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram* (Cet. III; Jakarta: Grafiti Press, 1989).
- H.L. Purnama, *Kerajaan Gowa; Masa Demi Penuh Gejolak*, (Makassar: Arus Timur 2014).
- Habrianto. S, Sahrul, dkk, *Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo Ke Limae Ajatappareng Abad XVI*. Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan. Vol. 6, No.3, Desember 2019.
- Hasaruddin Hasaruddin, Et Al., "Tracking The Historical Development Of Kedatuan Sawitto In South Sulawesi In The Xvi-Xvii Century," *Jurnal Adabiyah*" Vol. 21, No. 1 (2021).
- Hasse Jubba, Ahmad Sultra, Juhansar, *Kompromi Islam dan Adat Praktik Keagamaan Muslim Bugsi di Sulawesi Selatan*, JSW: jurnal sosiologi Walisongo- vol 2, no 2. 2018, h. 144.
- J. Noorduyn, *De Islamisering Van Makassar*, Terj. S. Gunawan, Islamisasi Makassar (Jakarta: Bhratara, 1972)., h. 13.
- Mappangara, Suriadi, Irwan Abbas. *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*. Biro KAPP Setda Sulsel bekerja sama Lamaca Press. 2003., h. 29.
- Mubalig Orang yang Menyiarkan (Menyampaikan) Ajaran Agama Islam. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V.
- Mutmainnah, dkk., *Kerajaan Gowa Pada Masa Pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia 153-1639*, Attiorilog Jurnal Pemikiran Kesejarahan Dan Pendidikan Sejarah Vol. 19 No.1. 2021.
- Pabbajah, Mustaqim, *Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar*, jurnal Al-Ulum Vol 12, no 2, Desember 2012.

- Perlas, Chirtian, *The Bugis*, Terj. Abu Rahman, Abu, dkk, Manusia Bugis (Cet. I: Jakarta: Nalar, 2006).
- Poelinggomang, Edward L. dkk. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*, Badan Penelitian dan pengembangan Daerah (Balitbangda). Cet.1. September. 2004
- Rasjid, Abdul dan Restu Gunawan, Makassar sebagai kota Martim, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2000.
- Salihima, Syamsuez, *Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi*, Jurnal Rihlah Vol II No. 1 Mei 2015.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII)* (Ed. II: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Susmihara, *Kemajuan Budaya Masyarakat Makassar Abad XVII*, (Jurnal Adabiyah Vol. 16 No. 1, 2016), h.63-64.
- Terkait dengan para pedagang Melayu melakukan permohonan tempat menetap dan berniaga di Siang, Namun daerah permukiman tersebut di bawah pengawasan Syahbandar I Daeng ri Mangngallekana, baca; Abd.Razak Daeeng Patunru *Sejarah Gowa.*, h. 14; Edward L. Poelinggomang, dkk. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*, h. 56.
- Tjandrasasmita, Uka, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota-Kota Muslim Di Indonesia Dari Abad XVII Sampai XVIII Maseh* (Cet. I: Kudus: Menara Kudus, 2009).
- Yani, Ahmad, *Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI-XVII M (Suatu Kajian Historis), "Skripsi"* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasha Islamiyah II* (Ed. I: Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).